

Efektivitas Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Berbasis E-Goverment Di Dinas Sosial Kabupaten Sragen

Effectiveness Of Using The Next Generation Social Welfare Information System Program (SIKS-NG) Based On E-Government In The Social Services Department Of Sragen District

Oleh

Shelfiyana Yulfa¹, Dra. Damayanti Suhita, M.Si²

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Shelfiyanay@gmail.com

Abstrak

Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) merupakan aplikasi yang digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam pendaatan kemiskinan berbasis e-government. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah proses pendaatan kemiskinan serta menghasilkan ringkasan data, seperti rekapitulasi, perbaikan data, dan pengusulan data baru. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kendala, salah satunya adalah kurangnya pemahaman sumber daya manusia terhadap teknologi, sehingga menghambat optimalisasi penggunaan SIKS-NG. Penelitian ini menggunakan teori Budiani (2007) yang mengacu pada empat indikator, yaitu Ketepatan Sasaran, Sosialisasi Program, Tujuan Program, dan Pemantauan Program. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan Program SIKS-NG berbasis e-government di Dinas Sosial Kabupaten Sragen. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pemilihan informan secara purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sementara analisis data mengacu pada teori Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan Program SIKS-NG berdasarkan keempat indikator tersebut bervariasi. Ketepatan sasaran dinilai kurang efektif akibat adanya kesalahan manusia (human error) dalam pelaksanaan di lapangan. Sosialisasi program juga masih belum optimal karena beberapa kendala masih ditemukan. Sementara itu, tujuan program dinilai sudah berjalan dengan baik, dan pemantauan program dianggap telah efektif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman petugas terhadap mekanisme program serta penguatan sosialisasi agar implementasi SIKS-NG dapat berjalan lebih optimal dan dikategorikan sebagai program yang sepenuhnya efektif..

Kata Kunci: Aplikasi SIKS-NG, Efektivitas Program, *E-Government*

A. Pendahuluan

Perkembangan pesat di bidang sistem dan teknologi informasi di Indonesia saat ini dianggap sebagai sumber daya yang sangat vital bagi kebutuhan baik organisasi pemerintahan maupun perusahaan swasta. Adanya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi dapat membantu kegiatan manusia di berbagai bidang, termasuk pada bidang pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi akan memberikan kelebihan tersendiri yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan penggunaan yang masih konvensional terutama sistem pelayanan di dalam pemerintahan. Dengan perubahan yang ditandai dengan peralihan penggunaan cara manual ke elektronik *goverment (e-goverment)*.

Sebagai bagian dari inisiatif pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dilakukan program pendataan bagi penduduk miskin. Program ini didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Proses pemutakhiran data menjadi tanggung jawab pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota. Mengacu pada Pasal 8, 9, dan 10 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, pemutakhiran data dilakukan secara berjenjang dengan tugas yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Sementara itu, Pasal 1 ayat (2) dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 menjelaskan bahwa pendataan merupakan suatu proses yang mencakup pengumpulan serta pemutakhiran data dalam berbagai bentuk, seperti angka, teks, gambar, dan data audio. Pendataan ini dilakukan dengan menggunakan metode diskusi, wawancara, serta observasi langsung.

Aplikasi SIKS-NG adalah sebuah platform manajemen yang dirancang untuk memperbaiki dan mengusulkan data baru dari Basis Data Terpadu (BDT), yang

menawarkan berbagai layanan (Kemensos, 2019). Aplikasi ini khusus digunakan untuk pemutakhiran data luring, hasil dari optimasi SIKS-NG, sehingga tidak memerlukan fungsi sinkronisasi atau input data. Kehadiran aplikasi SIKS-NG bertujuan untuk mempermudah dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan Data Terpadu Sosial (DTKS) (Pertiwi, 2020). Dengan aplikasi ini, pengguna dapat membuat data ikhtisar atau ringkasan, seperti rekapitulasi serta data hasil perbaikan dan usulan data baru (Husri, 2021).

Hadirnya Aplikasi SIKS-NG juga diharapkan mampu menjadikan layanan pendataan bantuan sosial menjadi efektif. Sehingga, mampu mendukung implementasi program-program anti kemiskinan pada Kabupaten Sragen. Dengan aplikasi ini juga diharapkan mampu membantu kerja pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sragen agar dapat lebih menghemat waktu, karena dengan mengandalkan aplikasi dalam pengisian data warga miskin.

Peluncuran aplikasi ini juga didasarkan karena sebelum adanya inovasi teknologi pada pelayanan masih sering ditemukan masalah terkait pendataan penerimaan bantuan sosial. Sistem yang masih manual dinilai membuat kinerja tidak praktis dan berpotensi tinggi terjadinya kesalahan dalam pendataan. Sebelum diberlakukannya SIKS-NG, petugas pendata warga miskin penerima bantuan sosial harus menyerahkan formulir ke kantor dinas sosial, dan petugas juga perlu mengunjungi rumah warga jika perlu data merevisi yang salah. Namun dengan adanya aplikasi SIKS-NG, petugas cukup mengirimkan data melalui aplikasi yang sudah tersedia. Dengan aplikasi data tersebut yang dimasukkan akan dinyatakan lengkap oleh sistem, sehingga pendataan harus sesuai dengan apa yang disyaratkan misalnya adanya lampiran foto pendukung seperti foto kondisi rumah warga, kartu bantuan dari pemerintah yang dimiliki

warga dan sebagainya. Selain itu, masyarakat juga dapat memeriksa langsung keakuratan data pada aplikasi tersebut terlebih aplikasi ini dikembangkan untuk ponsel berbasis android dimana hampir setiap orang memiliki.

Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa permasalahan dalam pengolahan data kemiskinan menggunakan Sistem Informasi Bantuan Sosial Generasi Berikutnya (SIKS-NG). Terutama, evaluasi sistem ini belum mengkaji secara mendalam hasil dan dampaknya bagi penerima manfaat. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya verifikasi langsung ke desa mengenai kondisi penerima manfaat setelah data diunggah oleh operator. Akibatnya, ketidakakuratan pendataan oleh operator desa dapat menyebabkan beberapa individu yang kurang mampu tidak terdaftar dalam basis data DTKS.

Operator desa mendapatkan data masyarakat miskin di daerahnya dari pendataan yang dilakukan oleh RT ataupun Bayan di daerah tersebut karena mereka tentunya yang lebih mengetahui akan masyarakatnya. Sehingga karena mereka merupakan orang yang mengetahui akan masyarakatnya tentunya operator desa sudah percaya dan tidak perlu mengecek langsung kelapangannya. Namun tidak di pungkiri masyarakat di beri tanggung jawab atas apa yang diberikan oleh pemerintahan nyatanya tidak sepenuhnya dilakukan. Dapat dilihat bahwasanya masih banyaknya tindakan kecurangan yang dilakukan, dimana mereka lebih memilih mendata masyarakat yang memiliki pendekatan pribadi pada RT atau pun Bayan. Hal ini menjadikan tidak tepatnya pendataan yang dilakukan karena dalam pendataan tidak di dasarkan pada kriteria yang di tentukan.

Selain itu, masyarakat desa masih kurang memahami cara memanfaatkan sistem berbasis teknologi karena personel yang ada belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengoperasikan teknologi tersebut. Banyak individu yang kurang mampu juga

tidak memiliki akses ke perangkat teknologi seperti ponsel pintar atau komputer, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam penggunaannya. Kondisi ini menimbulkan hambatan dalam memperoleh informasi serta memantau tahapan pendaftaran maupun penyaluran bantuan melalui aplikasi SIKS-NG. Selain itu, masih terdapat kemungkinan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami adanya program bantuan sosial yang tersedia serta prosedur yang perlu ditempuh untuk mengakses bantuan tersebut.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Whitney (dikutip dalam Nazir, 2009), metode deskriptif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat. Ia menjelaskan bahwa penelitian deskriptif berfokus pada isu-isu yang terjadi di masyarakat serta situasi dalam konteks tertentu. Penelitian ini mencakup berbagai aspek, antara lain hubungan sosial, aktivitas, sikap, pandangan, proses yang berlangsung, serta dampak dari fenomena tertentu. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengungkap berbagai peristiwa di lapangan melalui penelaahan terhadap nilai-nilai yang tersembunyi berkaitan dengan topik yang diteliti.

Berdasarkan pemahaman tersebut, peneliti memilih metode kualitatif deskriptif. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, dan menganalisis data deskriptif dalam bentuk kata-kata dan tulisan dari beragam dokumen serta informan yang diselidiki. Diharapkan, pemilihan metode kualitatif deskriptif ini dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai tujuan penelitian serta menggambarkan efektivitas dan

keberhasilan program SIKS-NG yang berbasis e-government.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan pengumpulan informasi dan data yang relevan dengan topik pembahasan yang dikaji. Dalam hal ini, peneliti memilih Dinas Sosial Kabupaten Sragen sebagai lokasi penelitian, yang beralamat di Jl. R. A. Kartini No. 8, Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57212. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor yang mendukung relevansi penelitian. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Sragen merupakan lembaga pelayanan publik yang menjadi tempat untuk melaksanakan Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Berbasis *E-Government*. Dinas Sosial Kabupaten Sragen adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengolahan dan penginputan data penerima bantuan sosial bagi masyarakat miskin ke dalam aplikasi SIKS-NG. Sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam pendataan ini, Dinas Sosial Kabupaten Sragen memastikan bahwa informasi yang akurat dan terkini dapat diakses untuk keperluan penyaluran bantuan sosial. Selain itu, berdasarkan penelitian – penelitian terdahulu, masih jarang dilakukan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Sragen terkait dengan efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan *Next Generation* (SIKS-NG).

3. Jenis data dan Sumber data

Adapu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Data ini diperoleh secara langsung dari responden tanpa perantaran. Pengumpulan data dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen dan Pemerintah Kota melalui metode wawancara dan observasi.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh secara tidak langsung dari beberapa sumber yang beragam. Sumber-sumber tersebut meliputi internet, buku, literatur, penelitian sebelumnya, serta dokumen dari Dinas Sosial Kabupaten Sragen.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di Kabupaten Sragen, aplikasi SIKS-NG gencar diperkenalkan pada tahun 2019. Dinas sosial di beberapa kecamatan memiliki tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi mengenai aplikasi ini. Setiap desa kemudian ditugaskan untuk menunjuk satu orang yang akan mengoperasikan aplikasi SIKS-NG. Tugas perangkat desa tersebut adalah memasukkan data warga miskin dan tidak mampu ke dalam aplikasi ini. Setelah data tersebut dimasukkan, informasi itu selanjutnya diteruskan ke Dinas Sosial Kabupaten Sragen untuk diperiksa dan divalidasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 mengenai Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu dalam Penanganan Warga Miskin dan Tidak Mampu, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa proses verifikasi data bertujuan untuk memeriksa dan menilai keakuratan informasi yang dikumpulkan. Selain itu, dalam Pasal 5 ayat (10) dijelaskan mengenai prosedur yang harus diikuti dalam melakukan verifikasi data guna memastikan

ketepatan dan keabsahan informasi yang digunakan.

Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa atau kelurahan, tetap bertanggung jawab atas ketidaktepatan dalam penetapan sasaran (Anwar Sitepu, 2019). Untuk mengurangi kesalahan dalam pendataan kesejahteraan sosial secara terpadu, Kementerian Sosial Republik Indonesia telah mengembangkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Sistem berbasis aplikasi ini dirancang agar dapat diakses baik secara daring (online) maupun luring (offline), sehingga mempermudah proses pendataan dan pembaruan informasi terkait kesejahteraan sosial.

Untuk menilai efektivitas program SIKS-NG di Dinas Sosial Kabupaten Sragen, diperlukan analisis data yang komprehensif. Dalam proses ini, peneliti mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan informan, yang hasilnya direkam dalam bentuk tertulis maupun audio. Selain itu, data sekunder berupa dokumentasi turut digunakan untuk memperkuat hasil penelitian. Pertanyaan yang diajukan kepada informan disusun berdasarkan indikator yang dikemukakan oleh Budiani (2007), yang mencakup ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, serta pemantauan program. Dengan pendekatan analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait efektivitas implementasi program SIKS-NG di Kabupaten Sragen.

1. Ketepatan Sasaran

Pemanfaatan program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Generasi Selanjutnya melibatkan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Data Sosial Terpadu, serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2022 yang menetapkan

kriteria penduduk miskin sebagai dasar usulan dari Menteri Sosial. Dengan program ini untuk menangani dan mendata terkait dengan kesejahteraan sosial salah satunya penangulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat (perlinjasos), dan rehabilitasi sosial dari data tersebut bisa digunakan sebagai sumber data penerima bantuan. Pada ketepatan sasaran bila dikatakan tepat sasaran bisa dikatakan cukup tepat sasaran dan sudah berjalan dengan baik namun tidak dipungkiri masih terdapat istilah *inclusess error* dan *eksekuse error* yang perlu di diperbarui, diperbaiki, dan diverifikasi dan validasi data. Sehingga dalam temuan ini dapat disimpulkan bahwasanya masih kurangnya pemahaman operator desa terkait mekanisme ataupun kriteria dalam menentuan masyarakat yang rentan miskin. Sehingga operator desa tidak dapat memanfaatkan program aplikasi SIKS-NG pada hal operator sudah diberikan keluwasaan oleh pusdaktim. Tentunya dari temuan ini dapat dilihat bahwasanya operator desa kurang dalam menyesuaikan dengan data pada lapangan padahal bila penggunaan ini dilakukan secara optimal tentunya dapat memajukan untuk desa itu sendiri.

2. Sosialisasi Program

Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam mensosialisasikan program ini dengan melaksanakan pembinaan teknis pada penggunaan akun sampai dengan ke tingkat desa. Secara formal pertemuan dilakukan setahun sekali dimana pada pertemuan ini akan membahas terkait dari program SIKS-NG. Akan tetapi memang bila dilakukan setiap tahun sekali kurang efektif, maka dari itu Dinas Sosial

Kabupaten Sragen tetap melakukan pengontrolan tiap bulan dan bahkan bila operator-operator mengalami kesulitan tentunya dinas sosial akan turun tangan. Sosialisasi SIKS-NG tidak hanya dilaksanakan oleh dinas sosial maksudnya dalam mensosialisasikan dinas sosial dibantu oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) dan pendamping program keluarga harapan (PKH) juga dilibatkan dalam sosialisasi. menunggu bimtek. Sosialisasi program ini sudah semaksimal mungkin dilakukan oleh dinas sosial, sehingga dapat dilihat bahwa keberhasilan dalam penyampaian program SIKS-NG dapat dilihat dimana detiap tahunnya saat priode baru pendidikan tingkat dasar sampai jenjang kuliah mereka mendatangi dinas sosial untuk meminta surat keterangan masuk DTKS. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya sosialisasi program SIKS-NG sudah dilakukan secara efektif. Namun tidak di pungkiran masih terdapat masyarakat yang kurang tahu atau kurang memahami akan program SIKS-NG biasanya ini terjadi kepada masyarakat yang yang masih jauh dari pusat informasi. Akan tetapi juga terdapat temuan yang mana masyarakat masih kurang respon artinya masyarakat ketika butuh baru mau mengurus ataupun menanyakan.

3. Tujuan Program

Dalam pelaksanaannya telah berjalan sesuai dengan harapan Dinas Sosial, yang berhasil memanfaatkan aplikasi SIKS-NG hingga menjangkau masyarakat. Dalam program SIKS-NG ini, Dinas Sosial tidak hanya memberikan layanan kepada instansi, tetapi juga memberikan dukungan di tingkat UTPK, MPP,

dan desa. Penggunaan program ini juga juga sudah sesuai dengan tujuannya yang mana untuk pendataan kemiskinan terutama di Kabupaten Sragen dalam pendataan ini dapat mengecek dan bahkan menonaktifkan masyarakat yang mendapatkan bantuan tentunya dengan program ini sangat efisien di bandingkan pada dulu sebuah adanya program ini. Terkait transparasan program SIKS-NG dapat dilihat bahwasanya ketika melakukan penetapan pada saat musdes masyarakat merupakan kompenen penting yang harus ada saat musdes biasanya masyarakat perwakilan seperti ketua RT. Akan tetapi, transparansi yang sudah dilakukan oleh operator masih saja menimbulkan kecemburuan sosial antara masyarakat yang mendapatkan dan yang tidak mendapatkan.

4. Pemantauan Program

Pada pemantauan program SIKS-NG juga selalu di lakukan oleh dinas sosial yang mana pada pemantauan ini di lakukan saat pertemuan semester satu biasanya pada saat musdes. Tentunya dalam pemantauan ada beberapa kendala yang mana terkait *inclus error* dan *eksekusi error*. Dan dalam pemantauannya dinas sosial juga akan mengevaluasi terkait desa mana yang aktif dan yang tidak aktif dalam pembaruan atau pemenuhan data dalam SIKS-NG. Dalam evaluasi operator tingkat desa ini dapat diketahui dinas sosial lewat dasbor yang tentunya dapat mendeteksi keaktifan operator desa. Bimbingan teknik yang dilakukan oleh dinas sosial itu sudah merupakan tindak lanjut artinya dalam hal ini dinas sosial sudah melakukan pemantauan bahkan dinas sosial juga menampung masalah-masalah dari operato desa

ke dinas sosial yang nantinya tidak bisa di selesaikan oleh dinas sosial akan disampaikan ke tingkat kementerian sosial. Dalam penelitian juga ditemukan bahwasanya operator desa mengatakan dalam persyaratan baru data masyarakat yang hasil data yang di setujui harus dipublikasikan hal ini tentunya agar transparans. memang transparans ini sangat baik akan tetapi malah menimbulkan kecemburuhan antar masyarakat pada temuan ini juga di rasakan oleh masyarakat bahwasanya memang terdapat kecemburuhan sosial di lingkungannya. Masyarakat juga berharap untuk sosialisasi terkait program ini lebih di tingkatkan terutama terhadap masyarakat yang jauh akan pusat kota dan memberikan perhatian kepada masyarakat yang gaptek.

D. Penutupan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, efektivitas program Sistem Informasi Bantuan Sosial Generasi Berikutnya (SIKS-NG) berbasis e-government di Dinas Sosial Kabupaten Sragen masih tergolong terbatas. Hal ini menandakan bahwa proses penargetan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kurang optimal, karena masih terdapat masyarakat miskin dan rentan yang belum terdaftar dalam data terpadu bantuan sosial. Akibatnya, para pelaksana program belum sepenuhnya memahami mekanisme dan standar operasional program. Padahal, program ini telah disertai dengan mekanisme pengelolaan data yang diatur dalam peraturan dan keputusan Kementerian Sosial mengenai kriteria masyarakat miskin.

Sosialisasi Program Dinas Sosial Kabupaten Sragen mensosialisasikan program SIKS-NG dengan melakukan pelatihan teknis hingga ke tingkat desa. Pertemuan formal diadakan setahun sekali untuk membahas program, tetapi Dinas Sosial juga melakukan pengendalian setiap bulan Meskipun sosialisasi dilakukan dengan baik, masih ada masyarakat yang kurang memahami program, terutama yang jauh dari sumber informasi. Selain itu, ada juga masyarakat yang hanya merespons saat membutuhkan informasi. Sehingga bisa dikatakan dalam mensosialisasikan terkait program SIKS-NG kurang optimal meskipun dinas sosial sudah melakukan upaya tidak dipungkiri masih terdapat masyarakat yang belum terjankau akan informasi.

Tujuan Program menunjukkan bahwa program SIKS-NG berhasil memenuhi harapan dinas sosial dan membantu masyarakat. . Program ini efektif dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Sragen dengan proses bantuan yang lebih efisien. Transparansi terbangun melalui musyawarah yang melibatkan masyarakat, namun masih terdapat perbedaan sosial antara penerima dan non-penerima bantuan. Operator desa setuju dengan efektivitas program, meskipun masih terdapat kekurangan fitur. Secara keseluruhan, SIKS-NG mempermudah pendataan kemiskinan. Pemantauan Program menunjukkan bahwa pemantauan program sistem informasi kesejahteraan sosial *next generation* berbasis *e-Government* di SIKS-NG sudah efektif. Pemantauan program dikatakan efektif karena dalam pemantauan program dinas sosial

mendapatkan informasi-informasi terkait kendala-kendala sehingga dinas sosial dapat mengevaluasi kendala tersebut. Lalu Dengan penggunaan dashboard, mereka dapat memantau keaktifan operator desa dan mengatasi masalah. Temuan di Kabupaten Sragen menunjukkan operator yang lebih tua kesulitan menggunakan program SIKS-NG. Namun dinas sosial selalu memberikan bimbingan untuk semua operator dan menangani masalah yang tidak teratasi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan saran. Dinas Sosial Kabupaten Sragen dapat melakukan pelatihan atau workshop berkala mengenai mekanisme program dan standar operasional prosedur (SOP). Dinas Sosial bisa memperluas saluran komunikasi dengan mengadakan sesi sosialisasi lebih intensif di desa-desa atau mengembangkan media penyuluhan yang lebih mudah diakses, seperti video tutorial, brosur, atau infografis yang dibagikan melalui WhatsApp atau media sosial lainnya. Memastikan pada pemantauan data yang diterima apakah sudah sesuai dengan lapangannya seperti dilakukan home visit ataupun sebelum di musdeskan data yang belum di sahkan dapat di transparansikan sehingga dengan ini menjadikan lebih transparan.

E. Daftar Pustaka

Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Pertiwi, M. T. (2020). Peran Dan Fungsi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Dalam

Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Sudimara Jaya (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Husri, H., Usman, D., & Mone, A. (2021). Efektivitas Aplikasi Program Pendataan Kesejahteraan Sosial Next Generation Di Kabupaten Gowa. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), 2(6), 1923-1935.

Sitepu, A., & Nainggolan, T. (2019). Pengelolaan Dan Pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Sosio Konsepsia, 8(2), 184-199.

Budiani, Ni Wayan. Jurnal Ekonomi dan Sosial, Vol.2, No.1, 2007: Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Bali. Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Udayana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan .

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3
Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Data
Terpadu Kesejahteraan
Sosial.